

Sekolah Tinggi Teologi SAAT
(Seminari Alkitab Asia Tenggara)

**SUMBANGSIH PEMIKIRAN KUYPER BAGI KONSEP BERKEADILAN
SOSIAL DALAM NEGARA PANCASILA**



Tesis Ini Diserahkan kepada

Dewan Pengajar STT SAAT

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

Magister Teologi

oleh

Lukas Cakra Raharja

Malang, Jawa Timur

Februari 2020

ABSTRAK

Raharja, Lukas Cakra, 2020. *Sumbangsih Pemikiran Kuyper bagi Konsep Berkeadilan Sosial dalam Negara Pancasila*. Tesis, Program studi: Magister Teologi, Sekolah Tinggi Teologi SAAT, Malang. Pembimbing: Andreas Hauw, Th.D. Hal. ix, 144.

Kata Kunci: Kuyper, Pancasila, keadilan sosial, kedaulatan Allah, anugerah umum.

Tesis ini ingin menjawab pertanyaan apa sumbangsih pemikiran Kuyper bagi konsep berkeadilan sosial dalam negara Pancasila. Pertanyaan ini muncul karena cita-cita negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya masih belum terwujud. Penulis melihat perlu adanya gagasan-gagasan baru yang dapat menolong negara ini mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan variabel keadilan sosial menurut Kuyper dan Notonagoro dalam kerangka konsep dan implementasi, maka hipotesis yang diajukan adalah pemikiran Kuyper memberikan sumbangsih dalam ranah konsepsi dan implementasi bagi konsep berkeadilan sosial dalam negara Pancasila. Secara konsepsi, inti yang didapat adalah pentingnya untuk melihat pada kedaulatan Allah dan anugerah-Nya dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa dalam menyikapi isu keadilan sosial. Secara implementasi, Kuyper melihat bahwa kedaulatan Allah diturunkan secara langsung kepada negara, masyarakat, dan gereja. Jika tiga entitas ini bergerak sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan, maka keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan manusia. Metodologi yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dapat berupa fisik dan elektronik. Penulis akan menggunakan sumber utama yang ditulis oleh Abraham Kuyper, juga beberapa buku dan jurnal yang berisi pemikiran Abraham Kuyper, serta buku dan jurnal mengenai Pancasila dari Notonagoro dan tokoh lainnya yang mendukung.

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	12
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan	14
BAB 2 KEADILAN SOSIAL DALAM PEMIKIRAN KUYPER	17
Biografi Abraham Kuyper (1837 – 1920)	17
Konseptualisasi Keadilan Sosial	21
Calvinisme dan Kuyper	21
Anugerah Umum	26
Dari Anugerah Umum menuju Keadilan Sosial	31
Pengimplementasian Keadilan Sosial	37
Ruang Lingkup Kedaulatan Pertama: Negara	38
Ruang Lingkup Kedaulatan Kedua: Masyarakat	45
Ruang Lingkup Kedaulatan Ketiga: Gereja	51
BAB 3 KEADILAN SOSIAL DALAM PANCASILA	59
Konseptualisasi Keadilan Sosial	59
Marhaenisme dan Soekarno	59

Marhaenisme: Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi	66
Dari Marhaenisme menuju Pancasila	70
Pengimplementasian Keadilan Sosial	77
Keadilan Segi Pertama: Negara	77
Keadilan Segi Kedua: Masyarakat	85
Keadilan Segi Ketiga: Gotong Royong	91
BAB 4 SUMBANGSIH PEMIKIRAN KUYPER BAGI KONSEP BERKEADILAN	
SOSIAL DALAM NEGARA PANCASILA	101
Sumbangsih Pemikiran Kuyper dalam Ranah Konseptual	101
Sumbangsih Pemikiran Kuyper dalam Ranah Implementasi	109
Sumbangsih Pemikiran Kuyper: Negara	109
Sumbangsih Pemikiran Kuyper: Masyarakat	117
Sumbangsih Pemikiran Kuyper: Gotong Royong	127
BAB 5 PENUTUP	141
Kesimpulan	141
Saran	142
DAFTAR KEPUSTAKAAN	143

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sedang bergerak menuju ke era Indonesia Emas 2045 atau tepat satu abad kemerdekaan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari zaman orde lama, orde baru, reformasi, pascareformasi, untuk terus mewujudkan kehidupan bangsa Indonesia—yang kata Bung Karno—tidak ada kemiskinan di dalamnya. Namun jika pertanyaan, “Masih seberapa jauh perjalanan bangsa ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur?” maka jawabannya akan sangat bervariasi tergantung dari sudut pandang yang dipilih.¹ Salah satu jawaban yang realistis datang dari Mahfud MD. Dalam salah satu diskusi di kampus

¹Vanda Ningrum, “Kemiskinan dalam Perspektik Global, Nasional, dan Lokal,” *Pusat Penelitian Kependudukan LIPI*, 1 Juli 2019, diakses 26 September 2020, <https://kependudukan.lipi.go.id/kajian-kependudukan/kemiskinan-dalam-perspektik-global-nasional-dan-lokal/>. BPS sendiri memilih menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan cara ini, kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu, yang disebut penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Batas kecukupan makanan dihitung dari besarnya uang yang dikeluarkan untuk makanan yang memenuhi kebutuhan minimum energi 2100 kalori perkapita perhari. Sementara itu, untuk batas kecukupan nonmakanan dihitung dari besarnya uang yang dikeluarkan untuk nonmakanan yang memenuhi kebutuhan minimum seperti, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. BPS sendiri menentukan 14 kriteria rumah tangga miskin yang mencakup kriteria makanan dan nonmakanan. Lih. Yuli Yanna Fauzie, “Percuma Ekonomi Tumbuh kalau Kemakmuran Semu,” *CNN Indonesia*, 23 Juli 2019, diakses 29 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190723142610-532-414710/percuma-ekonomi-tumbuh-kalau-kemakmuran-semu>.

Universitas Indonesia, beliau mengatakan, “Yang jadi masalah itu adalah adil dan makmur. Itulah sebabnya Indonesia emas belum ada sekarang, karena keadilan dan kemakmuran belum ada (di Indonesia).”² Perjalanan bangsa ini untuk mencapai kesejahteraan jelas masih panjang. Butuh perjuangan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa sila keadilan sosial dalam Pancasila dapat didekati melalui dua aspek, yaitu konseptual dan implementasi. Konseptual, secara khusus, berbicara tentang latar belakang masalah keadilan sosial; mengapa muncul ketidakadilan sosial dalam kehidupan masyarakat, bagaimana bentuk ketidakadilan itu, keadilan sosial yang seperti apa yang diharapkan terwujud di dalam Pancasila. Sementara itu, dari sisi implementasi, keadilan sosial membutuhkan elemen-elemen pendukung untuk mewujudkannya. Menurut Notonagoro, ada tiga elemen yang saling berhubungan membentuk segitiga keadilan, yaitu negara, masyarakat, dan relasi timbal balik antarmasyarakat.³ Penulis akan mengadopsi tiga elemen ini menjadi negara, masyarakat (demokrasi), dan gotong royong sebagai bagian dari pengimplementasian keadilan sosial.

Dari aspek konseptual, Pancasila membangun konsepsi keadilan sosialnya di atas pengalaman pahit penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Setelah kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad ke-16, maka agama Islam mulai berkembang di Indonesia. Hal ini berdampak pada munculnya kerajaan-kerajaan

²Dian Erika Nugraheny, “Mahfud MD Akui Indonesia Belum Adil dan Makmur,” *Kompas.com*, 17 Februari 2020, diakses 25 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/15262321/mahfud-md-akui-indonesia-belum-adil-dan-makmur>.

³Notonagoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer* (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975), 141.

Islam. Namun, bukan hanya kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara waktu itu, tapi bangsa Eropa juga mulai masuk dan menancapkan pengaruhnya. Pada awalnya, kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol hanya untuk mencari rempah-rempah. Mereka membangun hubungan dagang dengan penduduk lokal. Namun lama-kelamaan, pengaruh dari bangsa Portugis mulai kuat. Niat mereka bukan lagi untuk berdagang, tapi untuk menguasai hasil bumi Nusantara. Akhirnya, praktik perdagangan berubah menjadi praktik penjajahan.⁴

Penjajahan terus berlangsung hingga zaman Belanda dan Jepang. Praktik ini membuat masyarakat Indonesia mengalami penindasan dan penderitaan. Thobias A. Messakh memberikan dua bentuk ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat proto bangsa Indonesia.⁵ Pertama, hilangnya kebebasan dan sumber-sumber penghidupan untuk mengatur dan memelihara kehidupan mereka secara mandiri. Para penjajah merampas hak-hak untuk hidup dari masyarakat proto bangsa Indonesia demi kepentingan mereka sendiri. Kedua, bukan hanya hak-hak kehidupan yang dirampas, tapi juga harga diri mereka ikut dihancurkan. Mereka mengalami diskriminasi dan direndahkan, bahkan dijadikan alat pemuas bagi para penjajah.

Kondisi ini membuat para cendekiawan muda Indonesia membangun gerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh yang memainkan peran penting dalam gerakan ini adalah Soekarno. Keterlibatan Bung Karno dalam aktivitas politik waktu itu dimulai dari mendirikan Partai Nasional Indonesia tanggal 4 Juli 1927 dan terus berlanjut hingga terlibat dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

⁴Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya* (Yogyakarta: Paradigma, 2018), 14.

⁵Thobias A. Messakh, *Konsep Keadilan dalam Pancasila* (Salatiga: Satya Wacana University, 2007), 126.

Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan dasar negara, Pancasila. Di dalam Pancasila inilah tertulis cita-cita negara Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Suatu kondisi yang menurut Bung Karno, "... berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan."⁶

Saat ini bangsa Indonesia sudah tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Namun, ketidakadilan dan penindasan masih dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Mereka yang miskin secara ekonomi, lemah secara sosial, dan minoritas dalam politik adalah kelompok yang paling merasakannya. Ferry Y. Mamahit mengatakan tolok ukur paling jelas dan nyata terhadap keadilan sosial dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang miskin, terpinggirkan dan tertindas, dan yang tidak terjamin hak-haknya secara hukum, sosial, politik, dan ekonomi, di dalam suatu negara.⁷ Gawatnya, pandangan seperti ini lazim ditemukan di Indonesia. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan reflektif, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka?

Dari sisi implementasi, pemerintah selaku penyelenggara negara bertanggung jawab untuk mengupayakan terwujudnya keadilan sosial tersebut. UUD 1945 pasal 33 ayat 4 berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Salah satu upaya pemerintah yang menurut penulis telah mengakomodir prinsip tersebut adalah kebijakan BBM satu harga di Papua.

⁶Soekarno, "Keadilan Sosial dalam Pancasila," dalam *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, ed. Floriberta Aning (Yogyakarta: Media Pressindo, 2019), 253.

⁷Ferry Y. Mamahit, "Teologi dan Praksis Keadilan dalam Kitab Taurat," *Veritas* 11, no. 1 (April 2010): 1, diakses 14 April 2020, <https://doi.org/10.36421/veritas.v11i1.227>.

Bagaimana tidak, setelah berpuluh-puluh tahun harga BBM di Papua lebih tinggi berkali-kali lipat daripada di wilayah Indonesia Barat dan Tengah, mulai tahun 2016 masyarakat Papua dapat menikmati harga BBM yang sama. Menurut Presiden Jokowi, kebijakan BBM satu harga akan merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua.⁸

Tentu masih banyak upaya yang pemerintah telah dan akan lakukan yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam tulisan ini.⁹ Berbagai upaya tersebut kini sudah mulai terasa hasilnya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai angka satu digit, yaitu 9,22 persen per September 2019 atau dengan kata lain jumlah penduduk miskin di Indonesia kini tinggal berjumlah 24,79 juta orang. Secara lebih spesifik, jumlah penduduk miskin September 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 137 ribu orang (dari 9,99 juta orang pada Maret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada September 2019). Sementara itu, daerah pedesaan turun sebanyak 221,8 ribu orang (dari 15,15 juta orang pada Maret

⁸Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Kebijakan BBM Satu Harga: Upaya Wujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” *esdm.go.id*, 18 Oktober 2016, diakses 25 September 2020, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kebijakan-bbm-satu-harga-upaya-wujudkan-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>.

⁹Lih. Indah Budiati et. al., *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019* (Jakarta: BPS RI, 2019), 7, Adobe PDF ebook. Pada tahun 2016 pembangunan infrastruktur dipercepat dengan tujuan memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas. Lalu, pada tahun 2017 pembangunan infrastruktur bertujuan supaya terbuka kesempatan kerja yang lebih banyak dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Pada tahun 2018, infrastruktur dan investasi dipacu untuk pertumbuhan dan pemerataan. Lih. juga Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Lima Fokus Kerja di Periode Kedua Pemerintahan Jokowi,” *kppip.go.id*, 20 Oktober 2019, diakses 25 September 2020, <https://kppip.go.id/siaran-pers/lima-fokus-kerja-di-periode-kedua-pemerintahan-jokowi/>. Dalam pidato Presiden Jokowi se usai dilantik di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 2019, beliau memberikan lima hal yang menjadi prioritas dalam masa pemerintahannya yang kedua. Lima prioritas tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan dan pemangkasan regulasi, penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran, dan terakhir transformasi ekonomi.

2019 menjadi 14,93 juta orang pada September 2019).¹⁰ Angka ini tentu sangat mencengangkan karena jika ditarik mundur dari tahun 1970, maka penurunan angka kemiskinan di Indonesia telah mencapai lebih dari 50 persen.

Pemerintah dan seluruh komponen bangsa boleh sedikit bernafas lega dengan angka statistik tersebut. Namun, pemerintah tidak boleh terlena dengan fenomena “satu digit” itu karena laporan dari Bank Dunia yang berjudul "*Aspiring Indonesia, Expanding the Middle Class*" menyatakan sebanyak 115 juta atau 45 persen masyarakat di Indonesia berpotensi menjadi miskin kembali karena kelompok tersebut belum mencapai tingkat ekonomi yang aman.¹¹ Ditambah lagi, data dari *Institute for Development of Economics and Finance* menunjukkan meskipun angka kemiskinan Indonesia semakin menurun hingga mencapai *single digit* (9,22 persen per September 2019), tetapi kemampuan penurunan angka kemiskinan semakin berkurang. Selisih penurunan angka kemiskinan semakin mengecil dari tahun ke tahun. Artinya, pemerintah akan semakin sulit untuk menurunkan angka kemiskinan ke angka yang lebih kecil lagi.¹²

Namun, persoalan pemerintah bukan hanya dalam ranah kebijakan praktis, persoalan yang lebih mendalam muncul ketika negara berhadapan dengan

¹⁰Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2019 turun menjadi 9,22 persen,” *bps.go.id*, 15 Januari 2020, diakses 12 November 2020, www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html.

¹¹Ghita Intan, “Bank Dunia: 115 Juta Masyarakat Indonesia Rentan Kembali Miskin,” *VOA Indonesia*, 30 Januari 2020, diakses 17 Februari 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/bank-dunia-115-juta-masyarakat-indonesia-rentan-kembali-miskin/5266914.html>.

¹²Tim Peneliti FESD, “Melihat Kemiskinan Single Digit,” *INDEF*, 4 Februari 2020, diakses 12 November 2020, <http://indef.or.id/research/detail/melihat-kemiskinan-single-digit>.

supremasinya sendiri.¹³ Masalah ini sangat dilematis. Sebagai pihak yang menerima mandat untuk menjalankan Undang-Undang, negara memiliki kuasa untuk memaksa setiap entitas di bawahnya mengikuti aturan yang dibuat. Bahkan, dalam praktik lapangan, kuasa tersebut diperkuat dengan dukungan militer. Hal seperti ini sudah pasti akan menimbulkan perlawanan dari masyarakat. Tapi jika tidak demikian, maka pemerintah akan mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsinya guna mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan rakyat, menegakkan keadilan sosial, dan lain sebagainya seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁴

Selain peran pemerintah, usaha untuk mewujudkan keadilan sosial juga membutuhkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Memang, di dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki kedudukan yang tinggi. Kepentingan rakyat menjadi fokus dari segala kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Namun, kedaulatan dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat itu seharusnya memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Harry Ara Hutabarat mengatakan demokrasi mengutamakan peran rakyat.¹⁵ Dengan kata lain, di dalam demokrasi, rakyat bukan hanya menuntut hak, tapi juga melakukan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Tanpa peran aktif dari masyarakat, pemerintah tentu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Namun, nampaknya bangsa Indonesia masih perlu belajar banyak tentang arti demokrasi yang luhur. Sekalipun reformasi telah berlangsung lebih dari dua puluh

¹³Purwo Santoso, "Berpancasila secara Ikonografis: Saksama dalam Desain Diskursif," *Prisma* 37, no. 2 (2018): 166.

¹⁴Ibid.

¹⁵Harry Ara Hutabarat, "Demokrasi Pancasila, Permusyawaratan, Perwakilan: Suatu Kehidupan Bernegara yang Modern," dalam *Pancasila Rumah Bersama*, ed. Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yuandika Ruso, dan Jumady Sinaga (Jakarta: Libri, 2017), 101.

tahun, perwujudan demokrasi yang terjadi sekarang ini sudah menyimpang jauh dari filosofi demokrasi ala Pancasila. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia tidak lagi dipedulikan; istilah *kadrun*, *cebong*, dan sebutan lainnya merefleksikan bahwa identitas diri seseorang ditentukan oleh pilihan politiknya, bukan karena hakikatnya sebagai manusia.¹⁶ Kebebasan berpendapat digunakan sebagai pembenaran untuk *memposting* ujaran kebencian di media sosial. Aksi unjuk rasa yang dilakukan bukan lagi digunakan sebagai ajang adu argumen, tapi ajang adu otot yang berujung kerusuhan. Beberapa contoh ini menunjukkan demokrasi, yang menurut Pak Jokowi, sudah kebablasan.¹⁷ Demokrasi seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan, bukan justru menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa.

Berkaca dari kondisi sosial-politik saat ini, bangsa Indonesia tampaknya perlu kembali menghidupkan semangat gotong royong. Tanpa semangat gotong royong, peran negara dan demokrasi pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Gotong royong berarti setiap orang secara bahu-membahu memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Hari ini, pengertian gotong royong seharusnya tidak lagi diidentikkan dengan aktivitas fisik semata, tapi juga melibatkan aktivitas mental, seperti gagasan, ide, dan kreativitas yang baru.

Ada banyak gagasan dan solusi yang sudah diberikan oleh berbagai kelompok masyarakat Indonesia sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Misalnya, mereka

¹⁶M. Ikhsan, "Awal Mula Munculnya Istilah Cebong, Kampret, Kadrun di Medsos," *CNN Indonesia*, 14 Agustus 2020, diakses 21 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200814143813-192-535796/awal-mula-munculnya-istilah-cebong-kampret-kadrun-di-medsos>.

¹⁷Ihsanuddin, "Jokowi: Demokrasi Kita sudah Kebablasan," *Kompas.com*, 22 Februari 2020, diakses 21 Oktober 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/12031291/jokowi.demokrasi.kita.sudah.kebablasan>.

yang berkecimpung dalam dunia ekonomi akan berusaha memaksimalkan sistem ekonomi Pancasila untuk mewujudkan keadilan sosial, sesuai dengan visi yang telah dirumuskan oleh sidang BPUPKI.¹⁸ Sistem ini merupakan antitesis dari sistem ekonomi kolonial yang berbasis pada kekuatan modal asing dan eksploitasi sumber daya ekonomi.¹⁹ Di sisi lain, dari sudut pandang politik, Kusman mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dapat diwujudkan lewat jalur politik, yaitu “dengan cara membangun dan mengonsolidasikan kekuatan reformis dan progresif untuk terus-menerus memengaruhi ruang politik dan membangun alternatif blok politik baru dalam arena kekuasaan di Indonesia.”²⁰ Dalam kacamata hukum, keadilan sosial dapat tercapai jika supremasi hukum kembali ditegakkan. Suhardin menjelaskan, “Demi terwujudnya negara kesejahteraan, maka harus dimulai dari penegakan supremasi hukum (*supremacy of law*) yang berarti memposisikan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara.”²¹

Contoh gagasan dan solusi yang penulis sebutkan di atas pasti sangat berguna, tapi itu baru sebagian kecil. Negara ini masih memerlukan lebih banyak lagi anak bangsa yang secara aktif terlibat dalam urusan sosial. Akan tetapi, perkembangan

¹⁸Yustinus Prastowo, “Ekonomi Pancasila: Mengembalikan Pasar, Menyuntikkan Moral,” *Prisma* 37, no. 2 (2018): 107.

¹⁹Wahyudi Wibowo, “Sistem Ekonomi Pancasila: Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial,” dalam *Pancasila Rumah Bersama*, ed. Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yuandika Ruso, dan Jumady Sinaga (Jakarta: Libri, 2017), 131.

²⁰Airlangga P. Kusman, “Masih Relevankah Memperjuangkan Cita-Cita Keadilan Sosial?,” *Prisma* 37, no. 2 (2018): 105. Menurut Kusman, arena politik di Indonesia harus dibersihkan dari kekuatan oligarki yang memperebutkan sumber daya publik bagi kepentingan diri mereka sendiri.

²¹Yohanes Suhardin, “Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 42, no. 3 (September 2012): 303, diakses 11 September 2020, <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>. Suhardin menjelaskan bahwa supremasi hukum seharusnya menjadi patokan untuk merumuskan kebijakan dan penataan sistem ekonomi agar berorientasi pada keadilan sosial.

teknologi dan kebudayaan membuat masyarakat menjadi individualis. *Gadget* dan media sosial membuat masyarakat menjadi narsisme. Mereka juga cenderung menginginkan sesuatu yang instan. Banyak generasi muda yang tidak lagi terbiasa membaca dan berpikir kritis karena segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah. Mereka hanya memikirkan apa yang menjadi kepentingan dan yang memberikan keuntungan bagi diri mereka sendiri.

Secara realistis, masalah sosial yang ada sekarang ini sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan karena semua manusia di sepanjang zaman menghadapinya. Dari perspektif kekristenan, Abraham Kuyper (1837-1920) yakin masalah sosial muncul karena kegagalan manusia untuk menjalankan mandat yang Allah berikan kepadanya yaitu memelihara dan mengusahakan dunia ciptaan Allah. Kegagalan ini terjadi karena dosa manusia. Manusia yang seharusnya hidup melayani Allah, sekarang berbalik untuk melayani hawa nafsunya sendiri. Akibatnya, manusia yang sejatinya bisa menikmati kesejahteraan dan kemajuan secara sempurna, kini harus berjerih lelah untuk mewujudkannya.²²

Meski demikian, masih ada anugerah umum Allah yang menopang kehidupan manusia di bumi. Itulah sebabnya, menurut Kuyper, masalah sosial harus dilihat dari sudut pandang kosmik, yaitu sebuah sudut pandang yang melihat dunia ini sebagai ciptaan Allah yang sudah rusak karena dosa, tapi Allah melalui karya salib Kristus mau menebus dan memulihkan ciptaan-Nya.²³ Agaknya terlalu naif jika karya penebusan Kristus hanya dilihat dari kacamata soteriologi karena Kristus sendiri

²²Abraham Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, ed. James W. Skillen, terj. Calvin S. Budiman (Surabaya: Momentum, 2004), 29–31.

²³Kalvin S. Budiman, *7 Model Kristologi Sosial* (Malang: Literatur SAAT, 2013), 56–57.

adalah pribadi yang terjun langsung ke dalam masalah sosial. Kristus bertindak sebagai *Christus Consolator* (Kristus yang memberikan kelegaan) yang memanggil dengan penuh belas kasih kepada zaman yang sangat kaya tapi juga sangat letih dan berbeban berat untuk mendapat istirahat di dalam Dia.²⁴

Dalam mengembangkan teologi dan etika sosialnya, Kuyper sangat dipengaruhi oleh konsep Calvinisme. Ia mengatakan, “*In Calvinism my heart has found rest*”.²⁵ Calvinisme telah memberikan warna yang berbeda bagi setiap orang yang membaca konsep Kuyper tentang keadilan sosial, khususnya dari sisi politik. Salah satu prinsip fundamental di dalam Calvinisme adalah kedaulatan Allah. Menurut Kuyper, Allah telah menurunkan secara langsung kedaulatan-Nya ke dalam tiga wilayah, yaitu negara, masyarakat, dan gereja.²⁶ Tiga wilayah ini memiliki ruang lingkup masing-masing dan tidak boleh saling mengganggu satu sama lain. Setiap wilayah juga memiliki tanggung jawab sosial yang harus dilakukan.

Penulis berpendapat bahwa tiga ruang lingkup Kuyper ini dapat dikolaborasikan dengan tiga elemen keadilan sosial Pancasila sehingga dapat menghasilkan gagasan yang menjadi sokongan untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia, penulis ingin berkontribusi untuk membantu negara ini menjadi Indonesia Emas 2045. Karena bidang studi yang penulis tekuni adalah teologi, maka penulis akan mencoba menggali gagasan-gagasan teologis Kristen yang berkenaan dengan keadilan sosial.

²⁴Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 28.

²⁵Abraham Kuyper, *Lectures on Calvinism: The Stone Lectures of 1898* (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 12.

²⁶Abraham Kuyper, *Ceramah-Ceramah mengenai Calvinisme*, terj. Peter Suwadi Wong (Surabaya: Momentum, 2005), 88.

Penulis akan menggali pemikiran Abraham Kuyper (1837-1920) sebagai sumbangsih bagi konsep berkeadilan sosial di dalam negara Pancasila.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis sudah sampaikan, maka pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah apa sumbangsih pemikiran Kuyper bagi konsep berkeadilan sosial dalam negara Pancasila? Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran Kuyper bagi konsep berkeadilan sosial dalam negara Pancasila. Hipotesis dari penelitian ini adalah pemikiran Kuyper memberikan sumbangsih dalam ranah konseptual dan implementasi bagi konsep berkeadilan sosial dalam negara Pancasila. Beberapa asumsi yang mendasarinya adalah:

1. Kuyper melihat permasalahan sosial, seperti kemiskinan, muncul sebagai akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa membuat relasi manusia dengan Allah, sesama, dan alam menjadi rusak. Namun, Allah masih bermurah hati untuk memberikan anugerah umum-Nya. Anugerah inilah yang membuat manusia masih dapat menjalankan mandat budaya dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan. Di sisi lain, keadilan sosial dalam Pancasila dibangun karena penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia. Kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme bangsa asing telah membuat rakyat Indonesia sengsara. Karena itu, perjuangan untuk merdeka dari penjajahan merupakan pintu gerbang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Dalam Calvinisme, negara ada karena inisiatif dari Allah. Allah memakai negara untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Menurut Kuyper, kehadiran negara adalah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh warganya, menjamin hak-hak sosial yang dimiliki oleh masyarakat, dan secara aktif mewujudkan kesejahteraan lewat setiap produk undang-undang yang dihasilkan. Sementara itu, negara Indonesia didirikan atas inisiatif dari beberapa tokoh bangsa. Perjuangan mereka mendirikan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.
3. Berdasarkan pengalaman dari peristiwa Revolusi Prancis, Kuyper menolak kedaulatan rakyat. Alasannya, dalam kedaulatan rakyat posisi Allah digantikan oleh posisi manusia. Namun, Kuyper sepakat dengan sistem demokrasi, tapi demokrasi yang tetap memberikan posisi kedaulatan kepada Allah. Senada dengan itu, negara Indonesia juga menganut sistem demokrasi. Demokrasi memberikan kedaulatan penuh kepada rakyat. Kekuasaan berada di tangan rakyat. Kepentingan rakyat menjadi fokus dalam semua kebijakan negara.
4. Bagi Kuyper, gereja sebagai organisasi yang memiliki wilayah kedaulatan sendiri sehingga tidak boleh mencampuri urusan wilayah kedaulatan lain, seperti negara. Sebagai organisme, Kuyper berpendapat bahwa gereja harus secara aktif terjun ke dalam masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial yang ada karena masalah sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga gereja. Di sisi lain, negara Indonesia menganut sistem gotong royong. Sejarah membuktikan bahwa negara Indonesia dapat bertahan menghadapi berbagai tantangan baik dari internal maupun

eksternal karena semua elemen bangsa bergotong royong menyelesaikannya. Oleh sebab itu, gereja sebagai salah satu elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk ikut bergotong royong dalam menuntaskan masalah sosial yang ada.

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan model penelitian kepustakaan (*library research*) yang dapat berupa fisik dan elektronik. Ada banyak sumber-sumber, berupa buku, jurnal, tesis, dan disertasi yang menjelaskan mengenai keadilan sosial dari sudut pandang Kuyper dan Pancasila. Data-data hasil penelitian kepustakaan akan dipaparkan penulis seobjektif mungkin dan akan dikembangkan serta digunakan sesuai dengan tujuan penulisan. Menurut penulis, model penelitian kepustakaan adalah yang paling memungkinkan di dalam penelitian ini. Penulis akan menggunakan sumber utama yang ditulis oleh Abraham Kuyper, juga beberapa buku yang ditulis mengenai pemikiran Abraham Kuyper, buku-buku mengenai Pancasila dari Notonagoro dan beberapa tokoh lainnya.

Metodologi penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan analisis isi. Menurut penulis, metode deskriptif dan analisis isi sangat tepat untuk digunakan pada penelitian ini karena melalui analisis, penulis dapat mengetahui pemikiran Abraham Kuyper sehingga mampu mengerti alasan-alasan pemikirannya dan juga mengetahui filosofi dari Pancasila.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berisi pemaparan tentang permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini. Penulis memulai latar belakang penelitian dengan memberikan gambaran besar

konsep keadilan sosial dalam Pancasila dan pengimplementasiannya di dalam kehidupan bernegara, serta masalah-masalah yang muncul di dalamnya. Lalu, penulis akan memberikan gambaran besar pemikiran Kuyper tentang masalah sosial. Bab ini juga berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi pemaparan konsep Kuyper tentang keadilan sosial. Sebelumnya, penulis akan memaparkan latar belakang kehidupan, pendidikan, dan konteks zaman pada waktu Kuyper hidup. Setelah itu, penulis akan menjelaskan konseptualisasi keadilan sosial menurut Kuyper; mulai dari pandangan Calvinisme, anugerah umum, hingga keadilan sosial. Kemudian, masuk pada bagian pengimplementasian keadilan sosial yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ruang lingkup negara, masyarakat, dan gereja.

Bab III berisi pemaparan gagasan sila ke-5 dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab ini dibagi dalam dua bagian besar. Pertama, penulis akan menjelaskan konseptualisasi keadilan sosial dalam Pancasila; dimulai dari konsep Marhaenisme hingga menjadi prinsip kesejahteraan dalam Pancasila. Kedua, penulis akan menjelaskan pengimplementasian Pancasila dengan menggunakan model segitiga keadilan menurut Notonagoro. Segi pertama adalah negara, segi kedua adalah warga negara, dan segi yang ketiga adalah gotong royong.

Bab IV berisi pemaparan pemikiran dari Kuyper yang dapat digunakan sebagai sumbangsih bagi konsep berkeadilan sosial dalam negara Pancasila. Untuk mencapai ke sana, penulis akan terlebih dahulu memaparkan sumbangsih pemikiran Kuyper dalam ranah konseptual. Setelah itu, masuk ke dalam ranah pengimplementasian, yaitu negara, warga negara, dan gotong royong. Agar sumbangsih Kuyper dapat

terlihat lebih nyata, penulis menyertakan contoh peristiwa sosial-politik di Indonesia yang berhubungan dengan keadilan sosial.

Bab V berisi kesimpulan secara keseluruhan dan saran bagi penelitian selanjutnya.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adams, Cindy. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Diterjemahkan oleh Syamsu Hadi. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2018.
- Alfitri. "Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (September 2012): 449–472. Diakses 19 Agustus 2020. <https://doi.org/10.31078/jk%25x>.
- Arif, Syaiful. "Soekarno, Trisila, dan Pancasila," *Media Indonesia*. 20 Juni 2020. Diakses 14 Agustus 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/321964-soekarno-trisila-dan-pancasila>.
- Bacote, Vincent. "Beyond 'Faithful Presence': Abraham Kuyper's Legacy for Common Grace and Cultural Development." *Journal of Markets & Morality* 16, no. 1 (Spring 2013): 195–205. Diakses 15 April 2020. ATLASerials.
- Badan Pusat Statistik. "Persentase Penduduk Miskin September 2019 Turun menjadi 9,22 persen." *bps.go.id*. 15 Januari 2020. Diakses 12 November 2020. www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase-penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22-persen.html.
- Barrett, C.K. "Luke/Acts." Dalam *It Is Written: Scripture Citing Scripture*, diedit oleh D.A. Carson dan H.G.M. Williamson, 231–244. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Adobe PDF ebook.
- Berkhof, Lois. *Manual of Christian Doctrine*. Grand Rapids: Eerdmans, 1933. ePub.
- Bhakti, Ikrar Nusa, dan Natalius Pigay. "Menemukan Akar Masalah dan Solusi atas Konflik Papua: Supenakah?" *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (2012): 1–18. Diakses 20 Oktober 2020. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/443>.
- Bratt, James D. *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat*. Grand Rapids: Eerdmans, 2013. ePub.
- . Pendahuluan pada "Sphere Sovereignty," oleh Abraham Kuyper, 461–462. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. Adobe PDF ebook.
- Budiman, Calvin S. *7 Model Kristologi Sosial*. Malang: Literatur SAAT, 2013.

- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. Diedit oleh John T McNeill. Diterjemahkan oleh Ford Lewis Battles. 2 vol. Louisville: Westminster John Knox, 1960. Kindle.
- Carina, Jessi. "Ini yang Membuat Ahok Terjun ke Panggung Politik." *Kompas.com*. 17 April 2016. Diakses 27 September 2020. <https://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/17/12314601/Ini.yang.Membuat.Ahok.Terjun.ke.Panggung.Politik>.
- Catherwood, Sir Fred. "Orang Kristen dan Politik." Dalam *Allah dan Kebudayaan*, diedit oleh D.A. Carson dan John D. Woodbridge, diterjemahkan oleh Elda Siahaan dan Irwan Tjulianto, 232–256. Surabaya: Momentum, 2012.
- Darmayana, Hiski. "Mengenal Lebih Dekat Sosio-Nasionalisme Bung Karno." *Gesuri.id*. 19 Juni 2019. Diakses 13 Agustus 2020. <https://www.gesuri.id/serba-serbi/mengenal-lebih-dekat-sosio-nasionalisme-ajaran-bung-karno-b1WhKZk4h>.
- Dewantara, Agustinus W. *Alangkah Hebatnya Negara Gotong Royong*. Yogyakarta: Kanisius, 2017. Adobe PDF ebook.
- Dhakidae, Daniel. "Lima Bulan yang Mengguncang Dunia." *Prisma* 37, no. 2 (2018): 3–31.
- Dipoyudo, Kirdi. *Keadilan Sosial*. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Direktorat Jenderal Pajak. "Fungsi Pajak." *Direktorat Jenderal Pajak*. Diakses 12 November 2020. <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>.
- Doyle, William. *The French Revolution. A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2001. Adobe PDF ebook.
- Dyer, Bryan R. "Good News to the Poor." Dalam *The Bible and Social Justice : Old Testament and New Testament Foundations for the Church's Urgent Call*, diedit oleh Cynthia Long Westfall dan Bryan R. Dyer, 68–92. Eugene: Pickwick, 2016. Adobe PDF ebook.
- Grudem, Wayne A. *How Christians Should Relate to Government*. Grand Rapids: Zondervan, 2010. ePub.
- . *Politics According to the Bible: A Comprehensive Resource for Understanding Modern Political Issues in Light of Scripture*. Grand Rapids: Zondervan, 2010. ePub.
- Hamdani, Trio. "Bahlil: Negara Tak Boleh Semena-mena, tapi Rakyat Jangan Terlalu Kuat." *Detik Finance*. 8 Oktober 2020. Diakses 23 Oktober 2020. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5205879/bahlil-negara-tak-boleh-semena-mena-tapi-rakyat-jangan-terlalu-kuat?_ga=2.239098507.969006653.1603462144-696208777.1599197747.

- Harinck, George. "A Historian's Comment on the Use of Abraham Kuyper's Idea of Sphere Sovereignty." *Journal of Markets & Morality* 5, no. 1 (Spring 2002): 277–284. Diakses 13 April 2020. ATLASerials.
- . "Abraham Kuyper's Historical Understanding and Reformed Historiography." *Fides et Historia* 37, no. 1 (Winter/Spring 2005): 71–82. Diakses 13 April 2020. ATLASerials.
- . "Neo-Calvinism and Democracy: An Overview from the Mid-Nineteenth Century till the Second World War." Dalam *The Kuyper Center Review: Calvinism and Democracy*. Vol. 4. Diedit oleh John Bowlin, 1–20. Grand Rapids: Eerdmans, 2014.
- Hasyim, Syafiq. "Injil Bahasa Minang dan Gejala Inferiority Complex." *Tagar.id*. 15 Juni 2020. Diakses 12 November 2020. <https://www.tagar.id/injil-bahasa-minang-dan-gejala-inferiority-complex>.
- Hexam, Irving. "Christian Politics According to Kuyper." *Crux* 19, no. 1 (March 1983): 2–7. Diakses 3 April 2020. ATLASerials.
- Hiemstra, John L. "A Calvinist Case for Tolerant Public Pluralism: The Religions Sources of a Braham Kuyper's Public Philosophy." *Religious Studies and Theology* 34, no. 1 (2015): 53–83. Diakses 17 April 2020, <https://doi.org/10.1558/rsth.v34i1.26901>.
- Höpfl, Harro. *The Christian Polity of John Calvin*. Cambridge Studies in the History and Theory of Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. Adobe PDF ebook.
- Hutabarat, Harry Ara. "Demokrasi Pancasila, Permusyawaratan, Perwakilan: Suatu Kehidupan Bernegara yang Modern." Dalam *Pancasila Rumah Bersama*, diedit oleh Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yuandika Ruso, dan Jumady Sinaga, 99–115. Jakarta: Libri, 2017.
- Ihsanuddin. "Jokowi: Demokrasi Kita sudah Kebablasan." *Kompas.com*. 22 Februari 2020. Diakses 21 Oktober 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/22/12031291/jokowi.demokrasi.kita.sudah.kebablasan>.
- Ikhsan, M. "Awal Mula Munculnya Istilah Cebong, Kampret, Kadrun di Medsos." *CNN Indonesia*. 14 Agustus 2020. Diakses 21 Oktober 2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200814143813-192-535796/awal-mula-munculnya-istilah-cebong-kampret-kadrun-di-medsos>.
- Intan, Benyamin F. "Religious Freedom and the Pancasila- Based State of Indonesia: A Neo-Calvinist Idea of Principled Pluralism." *Calvin Theological Journal* 54, no. 1 (2019): 57–89.
- Intan, Ghita. "Bank Dunia: 115 Juta Masyarakat Indonesia Rentan Kembali Miskin." *VOA Indonesia*. 30 Januari 2020. diakses 17 Februari 2020.

<https://www.voaindonesia.com/a/bank-dunia-115-juta-masyarakat-indonesia-arentan-kembali-miskin/5266914.html>.

Irfan, Maulana. "Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 1–10. Diakses 9 Oktober 2020. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.14204>.

Ismail, Indriaty, dan Mohd Zuhaili K. Basir. "Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial." *International Journal of Islamic Thought* 1 (June 2012): 27–33. Diakses 3 Agustus 2020. <https://ssrn.com/abstract=2335859>.

Kaelan. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, 2018.

Kaemingk, Matthew. *Christian Hospitality and Muslim Immigration in an Age of Fear*. Grand Rapids: Eerdmans, 2018. Adobe PDF ebook.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Kebijakan BBM Satu Harga: Upaya Wujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *esdm.go.id*. 18 Oktober 2016. Diakses 25 September 2020. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kebijakan-bbm-satu-harga-upaya-wujudkan-keadilan-sosial-bagi-seluruh-rakyat-indonesia>.

Kennedy, Simon P. "Abraham Kuyper and His Political Thought: Calvinist and Pluralist." *The Reformed Theological Review* 72, no. 2 (Agustus 2013): 73–85. Diakses 31 Januari 2020. ATLASerials.

———. "Abraham Kuyper: Calvinist Anti-Revolutionary Politician and Political Thinker." *Australian Journal of Politics and History* 61, no. 2 (Juni 2015) (June 2015): 169–183. Diakses 31 Januari 2020. <https://doi.org/10.1111/ajph.12099>.

Kotter, David. "Sin: The Root Cause of Poverty." *Institute for Faith, Work & Economics*, 13 November 2013. Diakses 26 September 2020. <https://tifwe.org/sin-the-root-cause-of-poverty/>.

Kusman, Airlangga P. "Masih Relevankah Memperjuangkan Cita-Cita Keadilan Sosial?" *Prisma* 37, no. 2 (2018): 86–105.

Kuswono. "Marhaenism: Social Ideology Create by Sukarno." *Historia* 4, no. 2 (2016): 119–130. Diakses 1 Juli 2020. <http://dx.doi.org/10.24127/hj.v4i2.549>.

Kuyper, Abraham. *Ceramah-Ceramah mengenai Calvinisme*. Diterjemahkan oleh Peter Suwadi Wong. Surabaya: Momentum, 2005.

———. *Iman Kristen dan Problema Sosial*. Diedit oleh James W. Skillen. Diterjemahkan oleh Kalvin S. Budiman. Surabaya: Momentum, 2004.

———. *Lectures on Calvinism: The Stone Lectures of 1898*. Grand Rapids: Eerdmans, 1999.

- . “Sphere Sovereignty.” Dalam *Abraham Kuyper: A Centennial Reader*, diedit oleh James D. Bratt, 461–490. Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
- Laski, Harold J. *An Introduction to Politics*. London: George Allen & Unwin, 1931. Adobe PDF ebook.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Lay, Cornelis. “Musyawarah.” *Prisma* 37, no. 2 (2018): 72–85.
- Mamahit, Ferry Y. “Ide Teologis Calvin tentang Keadilan Sosial.” *Veritas* 10, no. 1 (April 2009): 29–58. Diakses 14 April 2020. <https://doi.org/10.36421/veritas.v10i1.211>.
- . “Teologi dan Praksis Keadilan dalam Kitab Taurat.” *Veritas* 11, no. 1 (April 2010): 1–21. Diakses 14 April 2020. <https://doi.org/10.36421/veritas.v11i1.227>.
- Marx, Karl, and Friedrich Engels. *The Communist Manifesto*. London: Penguin Classic, 2002. ePub.
- . *The Communist Manifesto A Road Map to History's Most Important Political Document*. Diedit oleh Phil Gasper. Chicago: Haymarket Books, 2005. ePub.
- McLellan, David. *Karl Marx Selected Writings*. Oxford: Oxford University Press, 2000. Adobe PDF ebook.
- . *The Thought of Karl Marx: An Introduction*. Ed. ke-2. London: The Macmillan, 1980. Adobe PDF ebook.
- Messakh, Thobias A. *Konsep Keadilan dalam Pancasila*. Salatiga: Satya Wacana University, 2007.
- Nggili, Ricky Arnold. “Persatuan Indonesia: Ciri Masyarakat Inklusif yang Bergotong Royong.” Dalam *Pancasila Rumah Bersama*, diedit oleh Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yuandika Ruso, dan Jumady Sinaga. Jakarta: Libri, 2017.
- Ningrum, Vanda. “Kemiskinan dalam Perspektik Global, Nasional, dan Lokal.” *Pusat Penelitian Kependudukan LIPI*. 1 Juli 2019. Diakses 26 September 2020. <https://kependudukan.lipi.go.id/kajian-kependudukan/kemiskinan-dalam-perspektik-global-nasional-dan-lokal/>.
- Noll, Mark A. “A Century of Christian Social Teaching: The Legacy of Leo XIII and Abraham Kuyper.” *Journal of Markets & Morality* 5, no. 1 (Spring 2002): 137–156. Diakses 17 April 2020. ATLASerials.
- Notonagoro. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1975.

- Nugraheny, Dian Erika. "Mahfud MD Akui Indonesia Belum Adil dan Makmur." *Kompas.com*. 17 Februari 2020. Diakses 25 September 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/17/15262321/mahfud-md-akui-indonesia-belum-adil-dan-makmur>
- Ottati, Douglas F. "What Reformed Theology in A Calvinist Key Brings to Conversations about Justice." *Political Theology* 10, no. 3 (2009): 447–469. Diakses 3 April 2020. ATLASerials.
- Prastowo, Yustinus. "Ekonomi Pancasila: Mengembalikan Pasar, Menyuntikkan Moral." *Prisma* 37, no. 2 (2018): 106–118.
- Purwanto. "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* 1, no. 1 (2017): 1–19. Diakses 3 Oktober 2020. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>
- Rahadian, Suarbudaya, dan Fially Fallderama. "Sikap Kritis terhadap Kekuasaan dalam Tradisi Calvinist: Sebuah Kajian Historis-Teologis tentang Kekritisan Gereja terhadap Pemerintah untuk Mewujudkan Regnum Christi." *Societas Dei* 7, no. 2 (Oktober 2020): 219–244. Diakses 20 Oktober 2020. DOI: 10.33550/sd.v7i2.173.
- Robertson, David. *A Dictionary of Modern Politics*. Ed. ke-3. London: Europa Publications, 2002. Adobe PDF ebook.
- Santoso, Purwo. "Berpancasila secara Ikonografis: Saksama dalam Desain Diskursif." *Prisma* 37, no. 2 (2018): 165–181.
- Saputra, Erandhi Hutomo. "Demokrasi Indonesia di bawah Kendali Oligarki." *Media Indonesia*. 8 Maret 2018. Diakses 9 Oktober 2020. <https://mediaindonesia.com/read/detail/148526-demokrasi-indonesia-di-bawah-kendali-oligarki>.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. *Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012. Adobe PDF ebook.
- Setiawan, Andri. "Nyong Ambon Pendeta Bung Karno." *Historia*. 14 Agustus 2019. Diakses 27 September 2020. <https://historia.id/politik/articles/nyong-ambon-pendeta-bung-karno-PyqLN>.
- Simanjuntak, Kardin M. "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (June 2015): 111–130. Diakses 18 September 2020. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.
- Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Diedit oleh Sigit Parikesit. Vol. 1. Jakarta: Banana Books, 2016. Adobe PDF ebook.
- Soekarno. *Indonesia Menggugat*. Departemen Penerangan Republik Indonesia. Adobe PDF ebook.

- . “Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia: Rapat Besar Tanggal 1 Juni 1945.” Dalam *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*, diedit oleh Floriberta Aning, 109–150. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.
- . “Keadilan Sosial dalam Pancasila.” Dalam *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, diedit oleh Floriberta Aning, 248–290. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.
- . “Kedaulatan Rakyat dalam Pancasila.” Dalam *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*, diedit oleh Floriberta Aning, 214–247. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.
- Stockwell, Clinton. “Abraham Kuyper and Welfare Reform: A Reformed Political Perspective.” *Pro Rege* 27, no. 1 (September 1998): 1–15. Diakses 25 Mei 2020. https://digitalcollections.dordt.edu/pro_rege/vol27/iss1/1.
- Stott, John. *Isu-Isu Global: Penilaian atas Masalah Sosial dan Moral Kontemporer menurut Perspektif Kristen*. Diterjemahkan oleh Endang Wilandari Supardan. Ed. ke-1. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2015.
- Suhardin, Yohanes. “Peranan Negara dan Hukum dalam Memberantas Kemiskinan dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 42, no. 3 (September 2012): 302–317. Diakses 11 September 2020. <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.274>.
- Sujarwoto. “Desentralisasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Kemiskinan di Negara-Negara Berkembang.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1, no. 1 (2015): 14–16. Diakses 18 September 2020. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2015.001.01.3>.
- Suryawasita, A. *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Tim Peneliti FESD. “Melihat Kemiskinan Single Digit.” *INDEF*. 4 Februari 2020. Diakses 12 November 2020. <http://indef.or.id/research/detail/melihat-kemiskinan-single-digit>.
- Tong, Stephen. “Hubungan Agama dan Politik: Suatu Refleksi Teologis-Kultural.” *Societas Dei* 1, no. 1 (Oktober 2014): 8–34. Diakses 15 Oktober 2020, DOI: 10.33550/sd.v1i1.46.
- Un, Antonius. “Calvinisme dan Hak Asasi Manusia.” *Verbum Christi* 1, no. 1 (2014): 141–163. Diakses 15 Oktober 2020. <http://verbum.sttri.ac.id/index.php/VC/article/view/17>.
- Van Dyke, Harry. “How Abraham Kuyper Became a Christian Democrat.” *Calvin Theological Journal* 33, no. 2 (November 1998): 420–435. Diakses 3 April 2020. ATLASerials.

- Van Til, Kent. A. "Abraham Kuyper and Michael Walzen: The Justice of the Spheres." *Calvin Theological Journal* 40, no. 2 (November 2005): 267–289. Diakses 3 April 2020. ATLASerials.
- Vander Kam, Henry. "Some Comments on Kuyper and Common Grace." *Mid-America Journal of Theology* 2, no. 1 (Spring 1986): 51–60. Diakses 17 April 2020. ATLASerials.
- VanDrunen, David. "Abraham Kuyper and the Reformed Natural Law and Two Kingdoms Traditions." *Calvin Theological Journal* 42, no. 2 (November 2007): 283–307. Diakses 3 April 2020. ATLASerials.
- Wattimena, Reza A.A. "Budaya Mafia di dalam Politik Indonesia." *Rumah Filsafat*. 12 Agustus 2019. Diakses 20 Oktober 2020. <https://rumahfilsafat.com/2019/08/12/budaya-mafia-di-dalam-politik-indonesia/>.
- . "Kajian Strategis atas Konflik Politik dan Konflik Sumber Daya di Papua." *Rumah Filsafat*. 16 April 2020. Diakses 20 Oktober 2020. <https://rumahfilsafat.com/2020/04/16/publikasi-terbaru-sampai-kapan-papua-bergejolak/>.
- Weber, Max. "Politics as a Vocation." Dalam *From Max Weber: Essays in Sociology*, diedit oleh Gerth, H.H., dan C. Wright Mills, 77–128. New York: Oxford University Press, 1946. Adobe PDF ebook.
- Wibowo, Wahyudi. "Sistem Ekonomi Pancasila: Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial." Dalam *Pancasila Rumah Bersama*, diedit oleh Broery Doro Pater Tjaja, Defli Yuandika Ruso, dan Jumady Sinaga, 131–135. Jakarta: Libri, 2017.